



POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

GAMBARAN UMUM

1. Informasi / Data tentang Nilai Maturitas SPIP

Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai SAKIP. Perkiraan capaian awal tahun 2021 Nilai SAKIP sebesar 64,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai 77.

Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen adalah Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Maturitas SPIP. Perkiraan capaian awal tahun 2021 nilai maturitas SPIP sebesar 3,00 dengan prospek pada akhir perencanaan pada tahun 2026 kondisi yang diharapkan mendapatkan nilai maturitas SPIP sebesar 3,50.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Masih terdapat kekurangan kompetensi SDM APIP dan sarana prasarana. Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki sertifikasi profesi baru 11 orang dan 2 orang penyuluh antikorupsi bersertifikat. Selain itu banyaknya penugasan mandatory (perintah) dari instansi atasan yang tidak dibarengi dengan pembekalan kemampuan teknis yang disyaratkan;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan pemerintahan desa belum efektif serta fungsi pembinaan belum dijalankan secara optimal. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 terdapat fungsi pembinaan dan pengawasan, namun dalam pelaksanaannya APIP lebih berfokus kepada fungsi pengawasan. Meskipun berfokus pada pengawasan, namun untuk pengawasan terhadap kinerja dan keuangan yang meliputi audit, revidu, evaluasi dan pemantauan belum memberikan nilai tambah 3E (ekonomis, efektif dan efisien) bagi pencapaian tujuan strategis/daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi belum efektif. Peran pencegahan tindak pidana korupsi secara berjenjang dari peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa dan pemerintah daerah belum optimal, sehingga masih banyak terjadi tindak penyalahgunaan

yang dilaporkan ke instansi vertikal (Aparat Penegak Hukum). Selain itu, terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing area belum bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi hanya tertuju pada peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

3. POHON KINERJA

3.1. Hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja

3.1.1. Meningkatkan Perencanaan, Evaluasi, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Dengan meningkatkan perencanaan, evaluasi, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, administrasi umum, penatausahaan keuangan dan kompetensi pegawai, sehingga dapat menunjang fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

3.1.2. Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Oleh APIP

Dengan Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP diharapkan akan bisa mencegah adanya tindak pidana korupsi dan terjaganya akuntabilitas perangkat daerah.

3.1.3. Meningkatnya Kapasitas Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Meningkatnya Kapasitas Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik dan standar pelayanan minimal

3.2. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*)

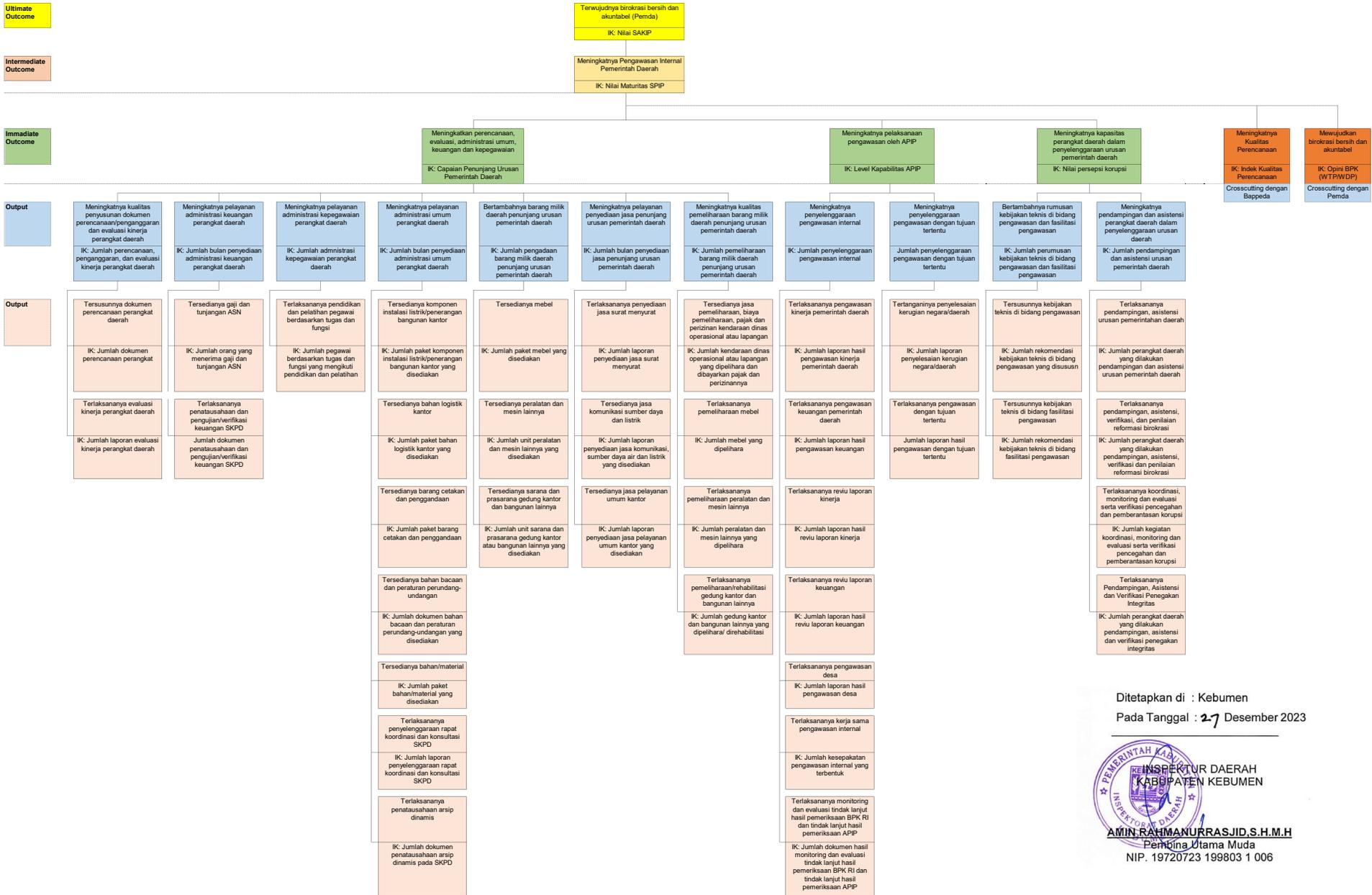
Outcome	CSF
Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Meningkatkan perencanaan, evaluasi, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan oleh APIP
	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah (Crosscutting BAPPEDA)
	Mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel (Crosscutting dengan Pemerintah Daerah)

3.3. Menguraikan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai Kondisi Paling Operasional

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatkan perencanaan, evaluasi, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah
	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah
	Bertambahnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan oleh APIP	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal
	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Bertambahnya rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
	Meningkatnya pendampingan dan asistensi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Adapun Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada diagram berikut:

POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH



Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
AMIN RAHMANURASJID, S.H., M.H.
Perdana Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

3.4. Merumuskan Indikator Kinerja

Ultimate Outcome	Intermediete Outcome	Immediate Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel (Pemda)					Nilai SAKIP
	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah				Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatkan perencanaan, evaluasi, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian			Capaian penunjang urusan pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah		Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
				Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Ultimate Outcome	Intermediete Outcome	Immediate Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah
				Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
			Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
			Tersedianya bahan/material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan
			Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
			Bertambahnya barang milik daerah		Jumlah pengadaan barang milik

Ultimate Outcome	Intermediete Outcome	Immediate Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
			penunjang urusan pemerintah daerah		daerah penunjang urusan pemerintah daerah
				Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
			Meningkatnya pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
				Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
			Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya

Ultimate Outcome	Intermediete Outcome	Immediate Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
				kendaraan dinas operasional atau lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
				Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP			Level kapabilitas APIP
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan oleh APIP	Meningkatnya penyelenggaraa n pengawasan internal		Jumlah penyelenggaraan pengawasan internal
				Terlaksana nya pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah
				Terlaksana nya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah
				Terlaksana nya reuiu laporan kinerja	Jumlah laporan hasil reuiu laporan kinerja
				Terlaksana nya reuiu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reuiu laporan keuangan
				Terlaksana nya pengawasan desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa
				Terlaksananya kerjasama pengawasan internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil

Ultimate Outcome	Intermediete Outcome	Immediate Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
				pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
			Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
				Tertangannya penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara
			Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu
		Meningkatnya Kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah			Nilai persepsi korupsi
		Meningkatnya Kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Bertambahnya rumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan		Jumlah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
				Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang di susun
				Tersusunnya kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang di susun
			Meningkatnya pendampingan dan asistensi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah		Jumlah pendampingan dan asistensi

Ultimate Outcome	Intermediete Outcome	Immediate Outcome	Output (Kondisi yang diperlukan)	Output (Kondisi yang diperlukan)	Indikator Kinerja
				Terlaksananya pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah
				Terlaksananya pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
				Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Kebumen, 27 Desember 2023
 Inspektur Daerah
 Kabupaten Kebumen



Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda – IV/c
 NIP. 197207231998031006